BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Yahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menunjukkan bahwa aparatur sipil negara harus menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menunjukkan bahwa para pejabat publik harus mematuhi kode etik dan kode perilaku pegawai yang terdiri dari cermat dan disiplin, sopan, tanpa tekanan, serta menjaga kerahasiaan yang menyangkut tentang kebijakan negara. Pada pelaksanaan tugas-tugas yang ada di dalam institusi, para aparatur sipil negara harus memiliki tanggungjawab kepada publik salah satunya adalah dalam perwujudan tanggungjawab etika.

Masalah etika di dalam brokrasi menjadi keprihatinan yang besar. Hal ini dikarenakan perilaku birokrasi mempengaruhi masyarakat banyak. Pada sisi lain, perlu diketahui bahwa birokrasi bekerja atas dasar kepercayaan karena seorang birokrat bekerja untuk negara dan untuk rakyat sehingga dianggap wajar apabila masyarakat mengharapkan adanya jaminan bahwa para birokrat yang dibiayai oleh negara harus mengabdi pada kepentingan umum menurut standar dan etika yang ada. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa organisasi atau birokrasi pemerintah berada dalam dinamika yang rendah karena organisasi yang bersangkutan memiliki sumber daya manusia yang masih rendah.

Adanya dinamika yang tinggi dapat dimotori oleh kualitas sumberdaya manusia yang tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun penggunaan teknologi sudah tinggi, prosedur kerja efektif dan efisien serta struktur organisasi yang mendukung namun tidak diimbangi dengan manusia atau pegawai yang memiliki kualitas yang tinggi maka akan sulit bagi organisasi untuk bergerak lebih maju. Begitu juga dengan kualitas sumberdaya manusia pegawai yang memadai tanpa adanya etika dan norma kaidah yang baik maka organisasi akan mengalami hambatan dalam proses pencapaian tujuan. Terkait demikian, etika pegawai cukup memiliki peran sebagai pediman dalam penerapan moralitas pada rangkaian proses atau prosedur terhadap pekerjaan dalam organisasi.

Etika menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan nilai dan moral. Etika administrasi negara adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Etika administrasi juga dianggap sebagai prinsip-prinsip moral yang mendasari perilaku para aparat birokrasi pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Sukri, Idris, & Burhanuddin, 2017).

Pada upaya pengembangan kualitas sumberdaya manusia ASN pada suatu organisasi atau instansi publik, diperlukan etika. Etika dijadikan pedoman dan peraturan yang mengatur pola perilaku pegawai. Etika tersebut berisi tentang ajaran-ajaran moral yang baik sehingga dapat menciptakan pegawai yang memiliki kesetiaan dan ketaatan yang tinggi, memiliki semangat pengabdian, keteladanan, disiplin, kemampuan dan kemantapan sikap mental dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini terjadi karena dengan adanya pemahaman, penjiwaan dan pengahayatan nilai-nilai etika yang ada maka pegawai dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar.

Organisasi atau instansi pemerintahan merupakan pihak yang berhadapan dengan masyarakat, oleh karena itu para pegawai yang ada diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang baik. Apabila pegawai dapat mematuhi dan melaksanakan nilai, norma dan aturan yang ada dalam etika administrasi maka tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, para pegawai dapat mengembangkan karakter pegawai yang berkepribadian, bekerja keras, dan disiplin.

Hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa para aparatur sipil negara di Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dianggap masih rendah dalam hal kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Hal ini diindikasikan dengan rata-rata jenjang pendidikan formal adalah tamatan SMA dan pelatihan ke jenjang selanjutnya masih sedikit peminat. Selain itu, masih terdapat pegawai yang datang terlambat. Pada sisi lain, terdapat pegawai yang datang sesuai jam masuk atau aturan yang ditetapkan namun dalam praktiknya, pihaknya mengobrol dan berdandan terlebih dahulu di saat jam operasi kantor Kecamatan buka atau dapat dikatakan pihaknya menunda jam pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen aparatur sipil negara dalam menerapkan etika administrasi masih rendah karena pemanfaatan kesempatan dan peluang untuk meningkatkan potensi dan aktualisasi sebagai manusia yang bermartabat belum dapat dikatakan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan etika administrasi dalam rangka pengembangan kualitas aparatur sipil negara dengan mengambil objek pada Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. Oleh karena itu, judul yang digunakan adalah “Penerapan Etika Administrasi dalam Rangka Mengembangkan Kualitas ASN di Kecamatan Pabean Cantian Surabaya”.

1.2 Batasan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar, maka peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian yaitu tentang nilai etika

administrasi yang terdiri dari efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, *merytal system*, responsibel, akuntabilitas dan responsivitas.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan etika administrasi dalam rangka mengembangkan kualitas ASN di Kecamatan Pabean Cantian Surabaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan etika administrasi agar dapat mengembangkan kualitas ASN di Kecamatan Pabean Cantian Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang etika administrasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif kepada mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

   Bagi peneliti, penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah sebagai penerapan ilmu Administrasi Publik pada lingkup masyarakat secara langsung. Selain itu, penulis juga bisa memperoleh ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman bari dari fenomena yang ditemui dalam proses penelitian.
2. Bagi Pembaca

   Peneliti memiliki harapan yang besar pada penelitian ini agar bisa menjadi sumber referensi bagi semua kalangan terutama bagi pihak Kantor Kecamatan Pabean Cantian dalam memahami etika administrasi beserta penerapannya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang mengambil tema sama agar dapat melengkapi hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang alasan pemilihan topik, objek penelitian dan pembatasan terhadap pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II berisi tentang penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian; landasan teori serta kerangka dasar penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi tentang metode pendekatan masalah, yaitu tentang metode kualitatif yang digunakan dan alasan penggunaan metode yang dipilih. Metode penelitian kualitatif terdiri dari: tipe penelitian, peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data dan tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV DESKRIPSI OBJEK, PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang deskripsi lokasi atau objek penelitian, dan penyajian data lapangan. Selain itu, bab ini juga berisi tentang pembahasan untuk menjawab perumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi tentang *review* pembahasan dalam bentuk kesimpulan. Pada akhir bab ini, penulis juga menuliskan keterbatasan penelitian, rekomendasi serta harapan bagi penelitian selanjutnya.